



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA METRO

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI AMANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **518694**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.135.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 10.477 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, WARISAN Rp. 275.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 1.511 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 479.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	188.887.774
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.864.387.774
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.864.387.774

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.